

POLITICAL ENTREPRENEURSHIP DI MADURA (STUDI TENTANG KUASA AKTOR DALAM DEMOKRATISASI LOKAL)

Laili Bariroh, M. Anas Fakhruddin

UIN Sunan Ampel Surabaya
l.bariroh@uinsby.ac.id

Abstract

This article focuses on efforts to find political entrepreneurship for political actors in Alang-alang Village and the prospects for democracy that are occurring. Based on the research conducted, there are several interesting things, including: First, the political entrepreneurship of Alang-alang village *Klebun* can be seen in the political strategy applied to manage the surrounding actors. Every relationship built by a *Klebun* to the actors around them is realized as part of the production of power and at the same time maintaining it. Second, in the context of democratization at the local level, political actors in Alang-alang village are trying to get out of the previous centralism of power. The tagline "People's soldier" made by the Alang-alang village government places the community as a king who must be served. However, the ability of *Klebun* to manage village politics must also be anticipated so that a new king does not emerge at the village level.

Keywords: Political Entrepreneurship, *Klebun*, Soldiers of the people.

Abstrak

Artikel ini fokus pada upaya untuk mencari *political entrepreneurship* aktor-aktor politik di Desa Alang-alang serta prospek demokrasi yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal menarik, antara lain: *Pertama*, *political entrepreneurship Klebun* desa Alang-alang terlihat dalam strategi politik yang diterapkan untuk mengelola aktor-aktor di sekitarnya. Setiap relasi yang dibangun oleh *klebun* terhadap aktor di sekelilingnya disadari sebagai bagian produksi kekuasaan sekaligus mempertahankannya. *Kedua*, Dalam konteks demokratisasi di tingkat lokal, aktor-aktor politik di desa Alang-alang mencoba keluar dari sentralisme kekuasaan sebelumnya. Tagline *Prajurit rakyat* yang dibuat oleh pemerintah desa Alang-alang, menempatkan masyarakat sebagai raja yang harus dilayani. Namun, kemampuan *klebun* untuk mengelola politik desa, juga harus diantisipasi agar tidak muncul raja baru di level desa.

Keywords : *Political Entrepreneurship, Klebun, Prajurit rakyat.*

Article History: *Reccived 18 September 2021, Revised: 30 October 2021, Accepted: 05 November 2021, Available online 20 December 2021*

Pendahuluan

Studi ini berawal dari sejumlah penelitian yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya tentang oligarkhi politik yang sangat kuat di Kabupaten Bangkalan, Madura. Abdur Rozaki mengidentifikasi, bahwa warna politik yang ada di kabupaten Bangkalan meliputi: oligarkhi politik dan dinasti politik. Syaikhona Kholil, yang memiliki pengaruh penting, menjadi simbol patron yang sangat kuat. Pengaruh dan karisma ini yang dimanfaatkan keturunannya membangun legitimasi kepada masyarakat, dengan mentransformasikan *symbolic goods* ke *symbolic power* dengan menggunakan modal budaya. Kultur politik tersebut tidak hanya terjadi di level kabupaten, tetapi semakin diperluas di level desa, dengan memanfaatkan kepala desa atau yang disebut *klebun* sebagai kepanjangan tangan Bupati serta menciptakan ketergantungan antara *klebun* dengan Bupati Fuad Amin Imron. Model kepemimpinan yang mengendalikan struktur kekuasaan lokal dan kelompok sosial di masyarakat tersebut, pada akhirnya menjadi modal sosial negatif dengan memanfaatkan jaringan sosial keagamaan untuk mempertahankan kekuasaan oligarkhis.

Kekuasaan oligarkhis dan cenderung personalistik yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan inilah yang kemudian melahirkan pertentangan di kalangan aktivis kritis. Di kalangan masyarakat, keinginan akan perubahan juga terjadi. Meskipun arus yang menghendaki perubahan kepemimpinan cukup mengemuka, namun faktanya, Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Bangkalan tahun 2018 berasal dari dinasti politik yang sama dengan bupati sebelumnya. Namun, angin perubahan tetap diharapkan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Salah satunya adalah harapan perubahan yang dimimpikan oleh masyarakat Desa Alang-Alang. Desa Alang-Alang memiliki potensi besar untuk berkembang. Secara geografis, posisinya cukup dekat dengan akses Suramadu, sehingga menjadi wilayah yang cukup strategis. Namun, dinamika politik yang oligarkhis di Kabupaten Bangkalan selama ini, menyebabkan potensi-potensi tersebut tidak bisa optimal. Modal sosial dan ekonomi yang dimiliki, sebenarnya menjadi harapan besar untuk melakukan perubahan signifikan.

Semangat baru perubahan di Desa Alang-Alang muncul dalam masa kepemimpinan Kepala Desa Fahrur Rozi yang terpilih sebagai PAW Kepala Desa Alang-Alang tahun 2019. Beberapa

terobosan sudah dilakukan, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura untuk mewujudkan *smart village*, serta mengarahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis industri. *Outcome* kerjasama tersebut adalah pembuatan sistem pelayanan berbasis digital.

Konsep *Smart Village* yang merupakan perwujudan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi dan kemudian dikembangkan desa Alang-Alang, tentu menjadi angin segar perubahan di Bangkalan. Sekalipun masih sangat dini, namun ini menjadi modal sosial awal untuk keluar dari kebuntuan oligarkhi dan politik dinasti yang menggurita di Bangkalan selama ini. Selain program *smart village*, angin perubahan juga terlihat dari pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan Desa. Partisipasi masyarakat diberi ruang oleh *klebun*, misalnya terlihat dalam kasus proyek pipanisasi Lanal Batu Poron dari Sumber Pocong yang dikeluhkan masyarakat Desa Alang-Alang. Aspirasi masyarakat disampaikan pada DPRD Kabupaten Bangkalan. Akibatnya, muncul respon dari Danlanal. Pelibatan masyarakat pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung, tentu merupakan perubahan signifikan di Desa Alang-Alang, setelah sekian lama terkooptasi oleh oligarkhi kepemimpinan di level kabupaten. Tentu saja ini menarik untuk dielaborasi sebagai pintu masuk untuk menemukan prospek demoratisasi lokal di Bangkalan.

***Political Entrepreneurship* dalam Konsep Politik Lokal**

Political Enterpreneur (Enterpreneur Politik) adalah seseorang (yang) biasa aktif dalam bidang politik ataupun ekonomi) yang mendirikan proyek politik kelompok atau proyek politik dari partai politik. Enterprenur Politik juga dapat disebut sebagai aktor politik (tidak harus seorang politisi) yang berusaha untuk meniti karier politiknya sendiri lalu mencari popularitas dengan mengejar penciptaan kebijakan yang menyenangkan rakyat.

Tapi ia adalah sosok politisi atau pemimpin yang bias melakukan perubahan tatanan/kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik secara kreatif. Dia adalah sosok yang bisa menawarkan tatanan ekonomi baru, yang bisa mengeluarkan pemikiran baru, atau lebih menjadikan masyarakat untuk modern dan sejahteraan masyarakat. Pemimpin yang terpilih seharusnya bisa menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis kewirausahaan.

Kewirausahaan politik ini mengacu pada pemimpin kreatif, yang memiliki akal untuk mempraktikkan ketrampilan politik untuk menghasilkan penciptaan kebijakan baru atau lembaga birokrasi baru, menciptakan lembaga baru, atau mengubah yang sudah ada. Dengan kata lain, kewirausahaan politik adalah kemampuan elit untuk memberikan inovasi politik dalam masyarakat. Seperti perilaku inovasi berorientasi dianut oleh pengusaha politik mirip dengan kewirausahaan dalam perspektif ekonomi atau bisnis. Jargon seperti "berpikir di luar kotak" atau "menciptakan pasar sendiri" menyoroti inovasi ini. Seorang *entrepreneur* adalah orang-orang yang sanggup mewujudkan lahirnya solusi atau resolusi baru yang dapat diwujudkan dalam bentuk ide, barang, dan jasa.

Tentunya cara yang diharapkan adalah dengan melahirkan ide-ide segar siap pakai yaitu menciptakan produk dan layanan baru maupun membuat metode baru atau melakukan inovasi dengan cara-cara yang belum terpikirkan sebelumnya pun juga kebutuhan untuk berprestasi berarti pemimpin tersebut memiliki motivasi untuk menjadi lebih unggul dan termotivasi untuk mencari situasi yang potensial mencapai keberhasilan. Wirausahawan dalam hal ini berarti juga selalu berusaha mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Oleh karena itu dilakukan evaluasi terhadap segala aktivitas usaha yang telah dijalankan untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan usaha.

Secara konseptual, Richard Cantillon pada tahun 1755 adalah orang pertama yang mengenalkan istilah *Entrepreneurship*. Istilah tersebut diambil dari Bahasa Perancis yakni *Entreprendre* atau perantara. Pada awalnya, istilah tersebut digunakan bagi orang-orang yang membeli barang lalu menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. Jean Baptista Say pada tahun 1803 mempopulerkan istilah ini, ia adalah seorang pakar ekonomi untuk menggambarkan para pengusaha yang memiliki sumber daya ekonomis untuk meningkatkan produktivitas yang rendah menjadi produktivitas yang tinggi. Pendapatnya erat tersebut terkait dengan banyaknya penemuan baru yang mendukung produksi pada abad 18 tersebut. Bersama dengan waktu, semakin banyak ahli yang membahas kewirausahaan dari berbagai sudut pandang dan mencetuskan definisi yang berbeda-beda tentang *entrepreneurship*. Ricard Cantillon pada tahun 1755 memahami definisi tersebut sebagai kewirausahaan secara klasik yang "bekerja sendiri" (*self-employment*). Seorang wirausaha membeli barang pada saat ini

dengan harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian

Karakteristik Political Entrepreneurship

Izedonmi dan Ofakator (2007: 191) menegaskan, bahwa individu yang memiliki karakteristik pemimpin politik sebagai wirausaha juga memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang dan menjadi penggerak sumber daya untuk mencapai tujuannya. Charles R Kuehl & Peggy A. Lambing mengemukakan bahwa ada empat unsur pokok setiap wirausahawan (*entrepreneur*) yang sukses, yaitu: 1) Kemampuan (hubungannya dengan *IQ* dan *skill*); 2) Keberanian (hubungannya dengan *Emotional Quotient* dan mental); 3) Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri). Secara spesifik, Gooffrey G. Meredith *et al* (2002: -5-6) memberikan daftar ciri-ciri dan sifat-sifat seorang wirausahawan sebagaimana tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Ciri-ciri dan Watak *Entrepreneur* Politik

Ciri-Ciri	Watak
Percaya Diri	Keyakinan, ketidaktergantungan individualitas, optimis.
Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan, ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, dan inisiatif.
Pengambilan Risiko	Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan.
Kepemimpinan	Bertingkah laku sebagai pemimpin, mudah bergaul, menanggapi saran dan kritik.
Keorisinilan	Inovatif dan kreatif, fleksibel, mengetahui banyak.
Orientasi masa depan	Pandangan jauh ke depan.

Sumber: Geoffrey G.Meredith *at al*, 2002:5-6.

Dari uraian ciri-ciri *Political Entrepreneurship* di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari karakteristik seorang wirausaha adalah kreativitas. Jadi seorang wirausaha dapat dibentuk, bukan lahir begitu saja. Dapat dilihat bahwa kewirausahaan pada dasarnya merupakan jiwa dari seseorang yang ekspresikan melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Dan orang yang memiliki jiwa tersebut tentu dapat melakukan kegiatan kewirausahaan atau menjadi pelaku kewirausahaan atau bisa lebih dikenal dengan sebutan wirausaha (*entrepreneur*). Maka sebaliknya yang tidak memiliki jiwa sedemikian tentu tidak bisa disebut sebagai wirausaha meskipun melakukan kegiatan bisnis.

Dalam studi tentang *Political Entrepreneurship*, Mc Caffery dan Sallerno mengemukakan, bahwa ada tiga arus besar pemikiran. *Pertama*, yaitu Politisi *rent-seeking*, yaitu politisi yang melayani dirinya sendiri, bahkan menjadi predator kepentingan politisinya sendiri. Aktivitas politik ini bersifat jangka pendek. *Kedua*, elemen *Entrepreneurship* untuk mendapat keuntungan dari sistem politik. Pada konteks ini, bisa bermakna bagaimana memperoleh pelayanan publik serta benda secara kolektif, mencari keuntungan kolektif yang potensial. Di dalamnya terdapat strategi kebijakan publik, budaya non material. *Ketiga*, Konsep Neo-Institusionalisme, yang menekankan pada aspek kemampuan aktor dalam *political entrepreneurship* untuk membentuk, mengubah, dan mengkonsolidasikan institusi-institusi politik. Aktor pembuat kebijakan ini bersifat strategis, karena berusaha mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

Political entrepreneurship juga didefinisikan sebagai arah sumber daya yang diperoleh secara paksa oleh negara di pasar yang bisa diidentifikasi. Berdasarkan definisi ini, kita bisa mengidentifikasi aktor yang dikategorikan sebagai *political entrepreneur*. *Political entrepreneur* adalah siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya publik. *Political Entrepreneur* dihasilkan dari sebuah proses kompetisi publik sehingga mendapatkan jabatan publik. Studi ini memberikan ruang bagi diskusi terkait motif atau faktor pendorong kewirausahaan dalam bidang politik sehingga bisa berhasil dilakukan.

Praktik *Political Entrepreneur* ditentukan oleh beberapa hal: *pertama*, peluang yang ditemukan secara politis, mempertahankan sumber daya politik dan hubungan *patronage*, serta melihat insentif yang diperoleh *political entrepreneur* dan menjadi daya dorong

tindakan mereka. *Kedua*, Mc Carfey dan Salerno tidak hanya memfokuskan pada aspek nilai-nilai ekonomi saja, tetapi juga menghasilkan uang dan barang kolektif. *Ketiga*, *political entrepreneur* bisa menargetkan perubahan institusi politik. Fokus utamanya adalah perubahan kelembagaan politik, perubahan kebijakan politik. Selain itu, ada tiga aspek dalam *political entrepreneur*, yaitu kepemilikan, ketidakpastian, dan produksi.

Tulisan ini fokus kepada kontrol atas sumber daya, (kepemilikan), akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan produksi pemerintah (barang publik maupun pribadi), untuk menciptakan nilai publik yang dipraktikkan di desa Alang-alang.

Inovasi Kebijakan *klebun Alang-alang* periode tahun 2019-2023

Desa Alang-alang di bawah kepemimpinan *klebun* Fahrur Rozi, diawali dengan keberhasilannya dalam pemilihan kepala desa tahun 2019, ketika kepala desa sebelumnya, yaitu Affandi, meninggal dunia. *Klebun* Affandi menjabat sebagai kepala desa Alang-alang selama setahun, dan kemudian meninggal dunia setelah sakit beberapa waktu. Setelah *klebun* Affandi meninggal dunia, terjadi dinamika internal di desa Alang-alang. Muncul beberapa orang dari kelompok *klebun* sebelumnya yang ingin mengambil alih kepemimpinan desa. Fahrur Rozi adalah anak tertua kepala desa Alang-alang yang meninggal dunia di tengah kepemimpinannya tersebut. Setelah kepala desa meninggal, muncul keinginan keluarga untuk kembali memimpin pemerintahan desa.

Kondisi desa Alang-alang yang tidak kondusif pasca meninggalnya *klebun* Affandi, menyebabkan Fahrur Rozi Kembali di desa Alang-alang. Proses pergantian antar waktu kepala desa Alang-alang dilakukan melalui Musyawarah Desa yang dilakukan pada tahun 2019. Setelah diadakan pemilihan oleh perwakilan masyarakat dalam Musyawarah Desa Alang-alang yang diikuti oleh 3 kandidat, yaitu Nur Aini, no urut 1, Fahrur Rozi no urut 2, dan Ahmad Fauzi calon no urut 3. Berdasarkan hasil musyawarah, Fahrur Rozi mendapatkan 32 suara, Nur Aini mendapatkan 6 suara, dan Ahmad Fauzi mendapatkan 3 suara. Sehingga Fahrur Rozi ditetapkan sebagai Kepala Desa Alang-alang periode 2016-2022.

Salah satu alasan terpilihnya Fathur Rozi adalah karena ia rajin turun ke bawah dan berbicara langsung dengan masyarakat. Jadi, meskipun muda, dia bisa meyakinkan masyarakat kalau ia bisa memimpin masyarakat. Selain itu, kepemimpinan *klebun*

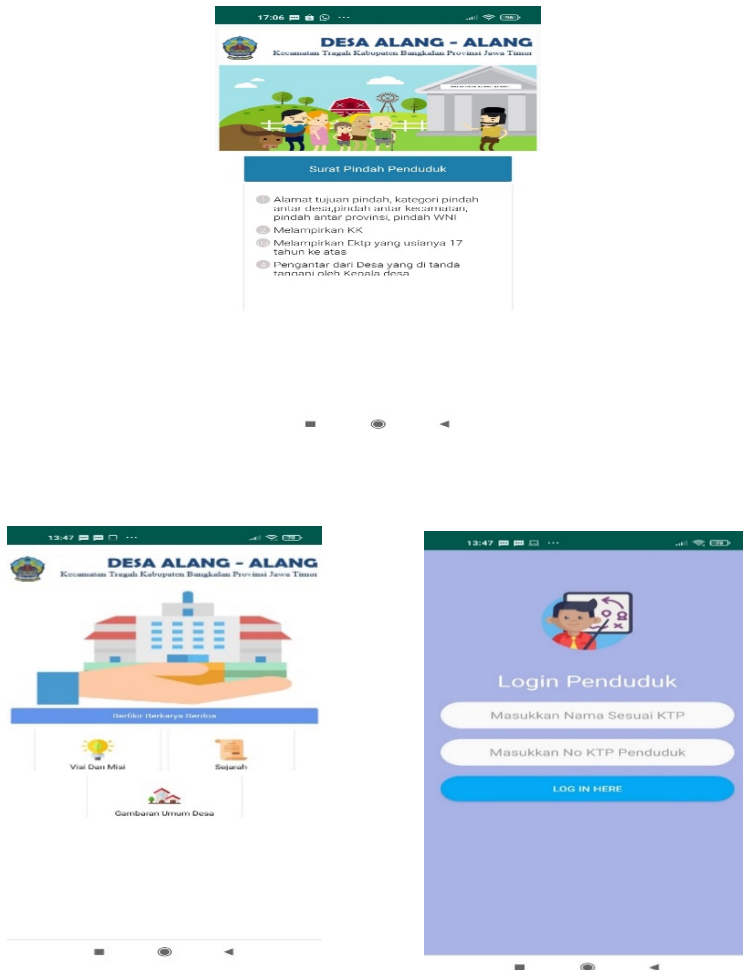
sebelumnya dirasakan masyarakat *stagnan* dan membuat desa tidak memiliki perubahan apapun. Dalam periode kepemimpinannya, *klebun* memiliki beberapa inovasi kebijakan, antara lain melakukan kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di bidang Teknologi Digital untuk mengembangkan desa. Hal ini dilakukan untuk menjadikan desa Alang-Alang sebagai desa *e-Government* atau digitalisasi. Berkat kerja sama itu, kini desa Alang-Alang memiliki aplikasi desa yang bisa diakses semua warga untuk mendapatkan informasi mengenai desa.

Inovasi lainnya yaitu membiayai pemuda desa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan sumber dana diperoleh dari dana desa. Dalam bidang pertanian, Fahrur Rozi juga sedang berinovasi untuk mengembangkan pertanian di desa Alang-Alang. Dalam digitalisasi desa, terdapat inovasi terbaru juga yang akan *launching* yaitu *one family one card*. Kartu itu sebagai pengganti KTP dan KK untuk pelayanan desa. Semua informasi identitas mulai KTP hingga KK ada pada kartu tersebut (Kabar Madura, <https://kabarmadura.id/kepala-desa-alang-alang-jalin-kerja-sama-dengan-utm-di-bidang-teknologi-digital-untuk-kembangkan-desa/>).

Pelayanan Masyarakat Melalui Aplikasi Smart Village

Smart Village merupakan sebuah pengembangan dari konsep *smart city*. Konsep *Smart Village* adalah desa yang menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dengan harapan suatu desa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mudah (Masterdesa.com). *Smart Village* lahir sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan desa juga untuk mengedukasi masyarakat desa, pelaksanaan program pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pada tahap awal, pemerintah desa Alang-alang Bersama dengan Universitas Trunojoyo Madura membuat aplikasi yang direncanakan menjadi media pelayanan publik melalui *e-government*. Aplikasi tersebut saat ini masih bersifat informatif, belum bisa digunakan sebagai media pelayanan publik. Ke depan, yaitu tahun 2022, desa Alang-alang akan memiliki Website khusus pemerintah desa Alang-alang dan juga pemutakhiran data aplikasi desa Alang-alang, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan pelayanan publik melalui aplikasi tersebut. Berikut ini tampilan aplikasi desa Alang-alang



Gambar 1.1
Aplikasi Desa Alang-Alang

Aplikasi *smart village* ini merupakan salah satu aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah desa Alang-alang untuk menjadikan desa Alang-alang sebagai desa modern tahun 2030 ([https://lingkar-jatim.com/madura/bangkalan/-outlook-desa-alang-alang tahun--2020/](https://lingkar-jatim.com/madura/bangkalan/-outlook-desa-alang-alang-tahun--2020/)) dan sesuai dengan semangatnya untuk menjadi *smart cyber village*. Sejatinya, modernisasi dalam pelayanan publik merupakan *future proof* yang sangat diperlukan untuk kemajuan zaman. Disisi lain, pemanfaatan teknologi ini pasti sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan berdampak luas. Di desa Alang-alang, kondisi ini disadari betul

oleh aparat pemerintahan desa sejak awal kepemimpinan *klebun*. *Klebun* menggunakan perspektif tersebut dengan menginisiasi pembuatan aplikasi.

Dalam perkembangannya, inisiatif tersebut disambut dengan baik oleh pihak perguruan tinggi yang tertarik dengan desa Alang-alang. Beberapa kegiatan yang dilakukan bersama yang menempatkan desa Alang-alang sebagai fokus kegiatan, akhirnya membuat beberapa masukan untuk pengembangannya. Dalam observasi yang dilakukan, aplikasi tersebut memang masih bersifat informatif, belum bisa diaplikasikan sebagai aplikasi pelayanan administrasi kemasyarakatan. Hal ini diakui *klebun* sebagai salah satu kelemahan yang ada saat ini dan akan dikembangkan pada tahun 2022 (Rozi, Wawancara, 12 juni 2021). Sekalipun belum sempurna dan perlu ada pemutakhiran aplikasi agar bisa digunakan untuk pelayanan publik secara optimal, tapi masyarakat desa Alang-alang mengapresiasi upaya kreatif yang dilakukan pemerintah desa karena mereka merasakan dampaknya, terutama pelayanan publik yang bisa diperoleh lebih cepat.

Sekalipun demikian, sosialisasi terhadap aplikasi tersebut juga belum tersebar secara merata, karena ada masyarakat yang belum mengetahui. Raghieb, seorang warga desa Alang-alang, sudah mendengar bahwa salah satu perubahan dalam pemerintahan desa Alang-alang adalah dalam hal percepatan waktu pelayanan publik, semisal pengurusan KTP.

Apa yang dipilih oleh pemerintah desa Alang-alang ini sebenarnya merupakan pilihan cerdas menghadapi modernisasi pemerintahan yang membutuhkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah desa Alang-alang menyadari betul posisi kelompok muda yang besar di jumlahnya di desa Alang-alang. Mereka hampir mayoritas memegang *smart phone* dan terbiasa menggunakan media sosial sehingga kelompok muda ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh kelompok tuanya.

Kalo masalah aplikasi, yang saya pake itu memang anak mudanya. Karena sekarang orangtua pasti tanya ke anaknya. Jadi triggernya itu di anak muda. Saya mau ngubah orang tua itu tidak bisa, jadi saya pake anak mudanya saja. (Rozi, Wawancara, 12 juni 2021)

Program Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Program beasiswa ini merupakan hasil dari kerja sama Pemerintah Desa Alang-Alang dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Biaya (beasiswa) pendidikan mengambil dana desa, dan

beasiswa ini *full* berlaku hingga lulus. Beasiswa pendidikan ditujukan untuk anak-anak muda yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Penerima beasiswa dipilih langsung oleh kepala desa tanpa proses seleksi. Namun saat ini ada proses seleksi terlebih dahulu terhadap calon penerima beasiswa. Dikarenakan sebelumnya ada penerima beasiswa yang sudah masuk ke bangku kuliah tapi berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu adanya proses seleksi guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya dan berharap yang mendapatkan beasiswa pendidikan benar-benar orang yang membutuhkan dan mempunyai niat yang serius.

Program beasiswa ini merupakan inisiasi *klebun* membangun kerjasama antara pemerintah desa Alang-alang dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Saat ini, pemerintah desa Alang-alang memiliki MoU dengan 3 Fakultas di UTM, yaitu Fakultas Teknik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan Fakultas Pertanian. Kerjasama tersebut meliputi aspek Tri dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Sumber dana pengelolaan program tersebut diperoleh dari dana desa dari pos anggaran peningkatan sumber daya manusia. Pada tahun 2021, *Klebun* menganggarkan 10 % dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 20%. Beasiswa tersebut bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura untuk program S1 dan menggunakan jalur mandiri. Pembiayaan digunakan untuk uang Gedung dan UKT. Apabila sudah diterima di UTM, biaya akan cair untuk dibayarkan. Skema ini dinilai *klebun* sebagai strategi menggeser anggaran. *Klebun* tidak meminta potongan biaya kepada pihak UTM, dengan harapan pihak UTM memiliki perhatian ke desa Alang-alang. (Rozi, Wawancara, 12 juni 2021)

Sampai tahun 2021, masyarakat desa Alang-alang yang menjadi penerima beasiswa ini berjumlah 10 orang. Program ini diapresiasi positif oleh masyarakat mengingat potensi yang dimiliki oleh pemuda desa Alang-alang. Namun, tidak banyak akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk melanjutkan ke Pendidikan tinggi. Salmah, seorang warga desa Alang-alang merasakan bahwa beasiswa pendidikan untuk jenjang Pendidikan tinggi merasa terbantu sekali dengan adanya beasiswa ini (Salmah, Wawancara, 12 Juni 2021).

Program pemberian beasiswa oleh pemerintah desa Alang-alang ini tentu menjadi hal baru dalam pengelolaan desa. Keber-

pihakan pemerintah desa untuk memperhatikan aspek pendidikan, tidak banyak dipilih oleh pemerintah desa. Pilihan ini tentu strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di desa yang akan berdampak panjang.

Selain mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan *eco print*, pemerintah desa Alang-alang juga mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi *smart village* yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2021. Pelatihan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat desa Alang-alang yang menguasai penggunaan aplikasi ini serta mencari masukan untuk pengembangan aplikasi tersebut.

Koperasi Produksi Pertanian

Koperasi produksi ini merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat desa Alang-alang. Pendampingan ini merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh desa Alang-alang setelah melakukan kerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura. Masyarakat merasakan manfaat program ini karena memiliki perspektif yang berbeda dalam produksi pertanian.

Adanya Koperasi produsen pertanian di desa Alang-alang yang didampingi oleh Bank Indonesia ini, *klebun* tidak memperoleh keuntungan secara material. Akses kerjasama diperoleh dari jejaring dengan UTM yaitu Dekan pertanian, Teknik, dan FISIB. Model kerjasama pendampingan mulai penanaman dengan bahan pangan dari desa Alang-alang. Dengan kata lain, *klebun* membayar 500 juta, tapi mendapatkan keuntungan lebih banyak. 4 tahun menjabat dengan dana desa sebesar 4 M, 500 jt digunakan untuk pos anggaran Pendidikan dan pada akhirnya mendapat apresiasi yang besar. Inilah yang disebut *klebun* sebagai gaya berpikir politisi (Rozi, Wawancara, 12 juni 2021).

Jika kita lihat, pilihan inovatif yang dilakukan oleh *klebun* desa Alang-alang tersebut tentu mengandung visi orientasi akan masa depan yang sangat kuat. Pada tahap awal pasti ada banyak risiko terkait pilihan tersebut tetapi kita bisa melihat bagaimana mengantisipasi risiko yang akan dihadapi juga menjadi bagian dari kecerdasan yang dimilikinya. Akses masyarakat ke dunia luar dibuka sehingga masyarakat akan terbiasa berinteraksi dengan dunia luar, tentu menjadi modal awal terbukanya jejaring yang sangat berharga untuk masyarakat desa Alang-alang.

Klebun membuka akses seluasnya kepada kampus melalui program-program pengabdian masyarakat. *Klebun* membiasakan

orang desa untuk ketemu dengan orang luar. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan ke UTM dalam bentuk biaya Pendidikan warga desa Alang-alang, kembali lagi ke Alang-alang, dalam bentuk pelatihan. Seperti pelatihan *eco print* yang merupakan kegiatan penelitian dosen. Pemerintah desa Alang-alang hanya menyiapkan tempat dan orang. Jadi ada simbiosis mutualisme (Rozi, Wawancara, 12 juni 2021).

Dalam konteks pengelolaan pertanian, dampak jangka panjangnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami proses pertanian modern yang tidak meninggalkan aspek alamiahnya. Juga dalam pemupukan sampai pada tahap distribusi hasil pertanian. Jika dikelola secara optimal, ini akan membawa dampak ekonomi yang penting untuk pengembangan ekonomi di desa Alang-alang. Masyarakat mengapresiasi munculnya koperasi produksi pertanian ini karena merasakan manfaatnya, seperti tersedianya alat pertanian yang dibutuhkan masyarakat yang bisa dijangkau masyarakat dengan mudah.

Sosialisasi Program Desa Melalui Media Sosial

Sebagaimana fenomena yang menggejala di berbagai belahan dunia, penggunaan media sosial sudah lazim di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di desa Alang-alang. Masyarakat di desa ini juga menjadikan media sosial sebagai komoditas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap orang memiliki beberapa aplikasi media sosial di gawai mereka.

Kondisi ini disadari betul oleh pemerintah desa Alang-alang. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, sosialisasi yang efektif pada proses pemerintahan di desa Alang-alang. Apabila akan diadakan kegiatan desa masyarakat diberitahukan terlebih dahulu oleh Klebun, seperti pengumuman di media sosial (Luluk, Wawancara, 5 Juni 2021). Semua peserta pelatihan *eco print* membuat *story* di Instagram untuk *upload* proses pencucian, perendaman. Sehingga masyarakat menjadi tertarik dengan kegiatan tersebut dan dibuktikan pada hari berikutnya, pesertanya bertambah banyak. (Salmah, Wawancara, 5 Juni 2021)

Strategisnya peran media sosial ini memang disadari betul oleh pemerintah Desa Alang-alang. Sehingga membentuk tim media sosial yang bertugas mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Diperkuat lagi dengan intensnya *klebun* mengupdate kegiatan di desa Alang-alang, sehingga ketersebaran informasi bisa dilakukan.

***Political Entrepreneurship* Aktor-Aktor Politik di Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan**

Diskusi tentang aktor politik sudah dilakukan oleh banyak pihak, sebut saja Goffman (1959), Parsons (1962), Hadizs, Dwipayana (2004), Zuhro (2009), Coleman (201), Pruitt dan Rubin (2011), Fahmid (2012), Amanda G (2014) dan Sjaf (2014). Juga ada tulisan Wawan Sobari (2020) yang mengidentifikasi aspek budaya dalam *political entrepreneurship* di desa. Namun, penelitian tentang aktor politik dalam perspektif *political entrepreneurship* dan menempatkan teknologi, media sosial dalam strategi pengelolaan desa belum pernah dilakukan. Di berbagai dinamika politik yang terjadi di Indonesia, fenomena rekrutmen kepemimpinan politik dari faktor pengangkatan dan politik elektoral lah yang mendominasi. Reformasi politik di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 adalah *entry point* untuk memilih peran dan arah perubahan politik. Sekalipun yang kemudian terlihat adalah reformasi politik dalam sistem pemilu dan kepartaian. Penataan regulasi negara terpusat pada upaya menata sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem legislasi untuk mencari bentuk ideal (Karim, 2020: 54).

Apa yang terjadi di Indonesia, sebenarnya juga terjadi di negara-negara dunia ketiga lain yang mengalami masa transisi otoritarianisme. Kebutuhan akan sirkulasi elite, juga adanya interkoneksi elit (Smith, 2003: 253-256) ini membutuhkan munculnya aktor politik lokal baru sekaligus membuka peluang kelompok yang tadinya termarginal dalam otoritarianisme untuk memainkan peran elite politik dengan lebih leluasa. Ini sebabnya mengapa analisis elektoral banyak mendominasi stabilitas rezim demokratis. Donald Emmerson, misalnya melihat manifestasi jatuhnya stabilitas politik pasca orde baru seperti konflik, kekerasan, ekonomi labil, separatisme dan parpol yang korup sebagai penyebabnya (Emmerson, 2003: 95-106). Tulisan lain disampaikan oleh Hadiz bahwa ada kepentingan predatori di antara aktor politik, efikasi politik serta aktor yang sebenarnya memiliki sifat anti politik karena kebijakan de-politisasi Orde Baru.

Di Bangkalan, kondisi demikian juga sangat kuat terlihat. Pasca otoritarianisme kekuasaan Fuad Amin Imron sebagai bupati Bangkalan, membuka peluang bagi aktor-aktor *civil society* dalam proses politik keterkaitan antara *civil society* dengan *political society* menguat signifikan dalam beberapa kasus (Lay, 2017: th). Setelah sekian lama dipimpin Bupati yang kepemimpinannya sangat khas otoritarianisme, maka bupati baru yang merupakan putra kandung Fuad Amin Imron, banyak dinilai sebagai *pseudo* aktor politik

karena bupati sesungguhnya adalah bapaknya yang saat itu menjadi anggota DPR. Kecenderungan terjadinya *pseudo* aktor politik dalam kekuasaan di tingkat lokal memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yang dibentuk oleh penjajah, dan diperkuat dengan kekuasaan orde lama, orde baru, juga masa transisi demokrasi dari sentralisasi kekuasaan menuju desentralisasi kekuasaan.

Pada kutub yang sama, munculnya aktor yang berjuang untuk mendapatkan distribusi dan alokasi nilai-nilai, memiliki peran besar untuk melakukan transformasi strata sosial secara individual maupun dengan kelompoknya. Situasi ini penuh dengan dinamika, negosiasi dan implikasi yang bisa menimbulkan konflik. Tetapi, apa yang ditunjukkan oleh *klebun* desa Alang-alang mampu dilakukan secara optimal. *Klebun* mampu menunjukkan kemampuan untuk membangun, mereproduksi dan mempertahankan kuasa melalui dikursus. Pada saat tertentu, ia menciptakan dukungan politik masyarakat yang kontra produktif dan menstimulasi konflik manifes bersifat horizontal. Peran ini disadari betul dan dimainkan oleh *klebun* sebagai bagian strategi politik yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan di desa Alang-alang.

Dalam perspektif kekuasaan, pemusatan perhatian pada aktor politik memang sangat menarik. Jika dihubungkan dengan budaya politik, maka aktor adalah *agency* budaya. Aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya lokal, sebagaimana disampaikan oleh Fakhur Rozi (Wawancara, 12 Juni 2021). Ia berusaha memanfaatkan *local wisdom* yang ada untuk melakukan pendekatan dengan kalkulasi yang diperhitungkan. Meskipun demikian, *klebun* sebagai aktor politik juga menjadi produsen (kreator) budaya dan perilakunya sangat mempengaruhi perubahan dan keberlangsungan nilai budaya-budaya politik lokal. Kesadaran untuk mempertahankan akses dalam kekuasaan, mendorong aktor politik di desa Alang-alang untuk mengambil pilihan melakukan perlawanan, penolakan, bahkan konflik “semu”. Ini sangat terlihat dari kemampuan *klebun* mengidentifikasi siapa kawan dan lawan dalam pemerintahan desa Alang-alang.

Dalam praktik kekuasaan, ditemukan relasi kuasa tubuh dan relasi kuasa pemikiran. Sebagaimana disampaikan Foucault, bahwa kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen, dan setiap relasi mengendapkan normalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku. Ini juga menempatkan subjek dalam konteks dampak dan kendaraan bagi kekuasaan

(*vehicle of power*). Di desa Alang-alang, *Klebun* memahami betul bagaimana strategi politik yang harus diterapkan untuk mengelola aktor-aktor di sekitarnya. Setiap relasi yang dibangun oleh *klebun* terhadap aktor di sekelilingnya disadari betul sebagai bagian untuk memproduksi kekuasaan sekaligus mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

Secara umum, beberapa strategi yang dilakukan oleh *klebun* adalah melakukan *Mapping* aktor-aktor politik di desa Alang-alang. Dalam konteks ini, *klebun* mencoba mengidentifikasi aktor-aktor kunci, memetakan dan menjadikannya sasaran untuk menjadikan mereka sebagai kendaraan bagi kekuasaan sekaligus sebagai arena kekuasaannya. *Klebun*, memosisikan dirinya sebagai *driving force* aktor politik di desa. Identifikasi yang dilakukan oleh *klebun* menjadi sebuah langkah kreatif yang dilakukan oleh seorang aktor politik untuk memperluas daya jangkauan kekuatannya sekaligus untuk memastikan optimalisasi sumber daya yang dimilikinya agar terbangun sebuah kekuatan yang mumpuni dalam praktik pemerintahan di desa Alang-alang.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh *klebun*, maka kelompok yang menjadi sasaran utama pelaksanaan kegiatan desa adalah kelompok ibu-ibu. Kelompok kedua yang menjadi sasaran kegiatan desa Alang-alang adalah kelompok pemuda yang jumlahnya sangat besar di desa Alang-alang. Pilihan ini adalah sebuah opsi strategis dengan pertimbangan, bahwa mendekati kelompok tua membutuhkan energi yang lebih besar. Berbeda dengan kelompok muda yang lebih mudah diajak melakukan perubahan.

Berdasarkan strategi yang dijalankan oleh *klebun*, maka ada elemen *entrepreneurship* yang bisa ditunjukkan oleh *klebun* secara positif dalam perspektif sistem politik. Keuntungan tersebut bisa diperoleh dalam proses pelayanan publik dan mencari keuntungan kolektif yang potensial. Di dalamnya juga terdapat strategi kebijakan publik dan budaya non material (Sallero, 2019: 17).

Dalam pendekatan neo institusionalisme, apa yang dilakukan oleh *klebun* desa Alang-alang, menunjukkan kemampuan aktor dalam *political entrepreneurship*, yakni kemampuan untuk membentuk, mengubah, dan mengkonsolidasikan institusi-institusi politik. Strategi politik yang dilakukan, adalah bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Dalam frame *political entrepreneurship*, aktor bisa mengatur arah sumber daya yang diperoleh secara paksa oleh negara di pasar

yang bisa diidentifikasi. Berdasarkan definisi ini, kita bisa mengidentifikasi aktor yang dikategorikan sebagai *political entrepreneur*. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya publik termasuk kategori *political entrepreneur*. Aktor ini dihasilkan dari sebuah proses kompetisi publik sehingga mendapatkan jabatan publik.

Di dalamnya akan muncul diskusi terkait motif atau faktor pendorong kewirausahaan dalam bidang politik. Dari kerjasama dengan Perguruan Tinggi, kita bisa melihat ada pemimpin yang memiliki kreativitas dan mampu memanfaatkan serta memanipulasi kekuasaan politiknya secara terampil untuk menghasilkan kebijakan baru atau memanfaatkan lembaga birokrasi yang ada, bahkan menciptakan lembaga baru atau mengubah/memperbaharui yang sudah ada. Misalnya dengan membuat koperasi produksi yang menjual alat-alat pertanian. Kita bisa melihat kemampuan elit untuk memberikan inovasi politik dalam masyarakat. Perilaku inovasi dalam aspek politik tersebut senada dengan prinsip kewirausahaan dalam perspektif ekonomi atau bisnis, yang memiliki jargon “berpikir di luar kotak” atau “menciptakan pasar sendiri”. Maka, seorang *entrepreneur* adalah orang-orang yang sanggup mewujudkan lahirnya solusi atau resolusi baru yang dapat diwujudkan dalam bentuk ide, barang, dan jasa.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melahirkan ide-ide segar (baru, menarik) dan siap pakai yaitu menciptakan produk dan layanan baru maupun metode baru atau melakukan inovasi dengan menggunakan cara-cara yang belum terpikirkan sebelumnya. Di dalamnya juga ada kebutuhan untuk berprestasi. Artinya, pemimpin tersebut memiliki motivasi untuk menjadi lebih unggul dan juga untuk mencari situasi yang potensial mencapai keberhasilan. Dalam hal ini *political entrepreneur* berarti seseorang yang selalu berusaha mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Sebab itu kemudian adanya evaluasi terhadap segala aktivitas usaha yang telah dijalankan untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan usaha.

Hal lain yang menarik dikaji adalah aspek kebijakan Politik Anggaran Desa sebagaimana terlihat dalam pengelolaan dana desa di desa Alang-alang. Di tempat lain, desa sering mengalami *shock culture* dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimilikinya. *Klebung* desa Alang-alang menyadari betul bagaimana memanfaatkan dana desa tersebut untuk program yang memiliki dampak jangka panjang, dan dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan

di wilayahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka muncullah program beasiswa untuk pemuda di desa Alang-alang. Saat ini, ada 10 orang yang biaya pendidikannya di Universitas Trunojoyo Madura difasilitasi oleh pemerintah desa Alang-alang.

Kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan kampus, tentu tidak dilakukan *by accident*, tetapi memang dihitung betul secara cermat oleh *klebun*. *Klebun* berupaya membangun Kerjasama dengan kampus karena berbeda frekuensi dengan Pemerintah kabupaten. Aspek pemberdayaan yang diinginkan oleh pemerintah desa Alang-alang, tidak bisa menemukan titik temu dengan kepentingan pemkab Bangkalan.

Selain itu, dengan bekerjasama dengan pihak kampus, maka desa Alang-alang tentu mendapatkan perhatian tersendiri dari UTM. Kerjasama yang dilakukan dengan skema pengembangan Tri dharma perguruan tinggi, menyebabkan peluang pemerintah desa Alang-alang untuk membuka akses kegiatan lain juga besar. Ternyata setelah ketemu politik desa, *klebun* merasa bahwa mengelola anggaran desa bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Sehingga *klebun* melakukan transparansi dengan mempublish di media sosial meskipun pilihan ini membuat banyak pihak juga tidak terlalu menyukai. Banyak pemerintah desa menyembunyikannya, bukan karena takut ketahuan, tapi karena tidak bisa menjelaskan. RPJMDes, BUMDes, dsb. (Rozi, Wawancara, 12 Juni 2021).

Kesadaran untuk melakukan transparansi tersebut, sesungguhnya menjadi insentif bagi *klebun*. Selain insentif secara material dan non material yang diperoleh, *klebun* mengidentifikasi bahwa kerjasama dengan kampus memiliki keuntungan yang sangat besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik yang terjadi secara umum di Bangkalan mengidentifikasi *klebun* desa Alang-alang sebagai salah satu aktor politik yang potensial di masa yang akan datang sehingga menimbulkan asumsi-asumsi serta kalkulasi politik. Berbagai kebijakan yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Desa Alang-alang serta publikasi media yang luas, menyebabkan *klebun* Alang-alang patut diperhatikan setiap langkah politiknya.

Kepemimpinan yang terlihat inovatif, bukan kemudian tanpa resistensi. Muncul kecurigaan bahwa Fahrur Rozi akan masuk bursa Pileg 2024 atau Pilbup dan sebagainya (Fauzan, wawancara, 19 Juni 2021). Sehingga banyak juga yang tidak suka dengan cara-cara *klebun* memimpin di Alang-alang. Inilah salah satu penyebab

klebun lebih memilih untuk mengurangi konfrontasi dengan pihak-pihak lain dan lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan kampus, dalam hal ini UTM.

Berdasarkan kondisi politik secara umum di Bangkalan, maka kita bisa menemukan benang merah keterkaitan strategi yang dilakukan oleh *klebun* desa Alang-alang dengan keinginan untuk mempertahankan sumber daya politik yang dimilikinya. Praktik *political entrepreneur klebun* ditentukan oleh beberapa hal: *pertama*, peluang yang ditemukan secara politis, upaya mempertahankan sumber daya politik dan hubungan *patronage*. Selain itu, para aktor politik juga tetap menghitung insentif yang diperoleh *political entrepreneur* dan menjadi daya dorong tindakan mereka.

Di sini sangat terlihat bagaimana *klebun* desa Alang-alang sebagai seorang aktor politik memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk proses perubahan kelembagaan politik dan perubahan kebijakan politik sebagaimana aspek penting dalam *political entrepreneur*. Dalam hal kepemilikan, pilihan-pilihan tersebut tentu menjadi pengikat antara *klebun* dengan masyarakat desa, termasuk di dalamnya adalah aktor-aktor yang selama ini berpengaruh dalam dinamika pemerintahan desa. Komunikasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah desa Alang-alang mampu membangun hubungan yang kondusif bagi proses pembangunan desa.

Pada aspek substansi, *political entrepreneurship* menjadi bagian upaya teoritis untuk memahami dualitas “struktur” dan “agensi” dalam evolusi sosial. Aspek penting terkait peran aktor-aktor dalam *political entrepreneurship* adanya perubahan mengenai inovasi institusional. Sangat mungkin aktor yang menjadi *political entrepreneur* melakukan perubahan kebijakan dan memberi gambaran seorang *entrepreneur* dalam organisasi politik tertentu, atau dalam konteks sebagai pengambil keputusan politik.

Apa yang dilakukan *klebun* untuk memilih Carik sebagai pengelola keuangan desa, bisa jadi adalah salah satu inovasi pengelolaan pemerintah desa yang dilakukan dalam konteks transparansi keuangan desa. Ini merupakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Keleluasaan lain yang dimanfaatkan oleh *klebun* untuk melakukan perubahan juga terlihat dari usahanya untuk menjadikan aparat pemerintah desa bebas dari narkoba dan berencana melakukan tes urine untuk seluruh aparat desa tahun 2022 nanti.

Sekalipun ada banyak keleluasaan yang bisa dilakukan seorang *entrepreneur*, namun sering kali juga muncul kendala struktural dan kerangka kelembagaan seperti mekanisme *checks and balances* konstitusional. Kendala ini bervariasi derajatnya dalam ruang dan waktu tertentu. Asumsinya, semakin lemah kerangka kelembagaan formal, semakin besar kelonggaran untuk mengembangkan aktivitas kewirausahaan individu. Situasi krisis politik yang dialami oleh perilaku elite menjadi pusat pengembangan kelembagaan secara berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan oleh *klebun* ini sebenarnya menjadi karakter khas yang dimiliki seorang *political entrepreneur*. Ia memiliki kreativitas yang bisa membentuk inovasi, kreativitas. Hal tersebut adalah sesuatu yang bisa dibentuk, bukan lahir secara tidak sengaja. Dari sini terlihat jiwa kewirausahaan diekspresikan melalui sikap dan perilaku kreatif dan inovatif dalam berkegiatan (Meredith, 2007: 9). *Klebun* desa Alang-alang bisa dikategorikan sebagai *political entrepreneur*. Ia mencoba keluar dari situasi sentralisme kekuasaan yang melahirkan kekuasaan otoriter menjadi kekuasaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Upayanya untuk keluar dari situasi kekuasaan *status quo* menjadi kepemimpinan yang melayani adalah sebuah inovasi dalam kepemimpinan politik di Bangkalan.

Dalam perspektif Randall G. Holcombe (2002: 143-159), kewirausahaan ini terjadi ketika; *pertama*, seseorang bisa mengamati dan menemukan peluang keuntungan politik. Berikutnya, *kedua*, seseorang cukup berhati-hati dalam menganalisis peluang untuk mendapatkan keuntungan. *Ketiga*, individu tersebut sudah mempersiapkan diri melakukan tindakan berdasar peluang yang dihadapinya. Pilihan sikap, perilaku *klebun* untuk mengelola masyarakat, aparat desa dengan Menyusun *mapping* terlebih dahulu untuk memetakan kekuatan dan kelemahan di desa menjadi pintu masuk untuk memulai usaha maupun kegiatan produktif dengan cara mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi agar bisa melakukan pelayanan publik yang lebih baik, bahkan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari apa yang menjadi modal awalnya. Jika menggunakan frame Holcombe, *klebun* Alang-alang mempraktikkan jenis kepemimpinan *productive*, karena melakukan upaya mengambil Sebagian keuntungan untuk kepentingan orang lain.

Sikap, perilaku, semangat serta kemampuan *political entrepreneur* yang terlihat dalam menangani usaha maupun kegiatan yang produktif (mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja,

teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi) dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dari berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, *entrepreneurship* lingkup yang cukup luas bersifat dinamis.

Jika merujuk konsep Geoffrey Meredith tentang ciri-ciri *Political Entrepreneurship*, maka karakteristik seorang *political entrepreneur* sangat terlihat pada aktor-aktor di desa Alang-alang. Karakter tersebut antara lain: *pertama*, memiliki kepercayaan diri, yang mewujudkan dalam keyakinan, kemandirian, individualitas, optimis. *Kedua*, berorientasi pada tugas dan hasil. Hal ini bisa ditunjukkan dengan kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba juga memiliki ketekunan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat serta inisiatif.

Ketiga, memiliki kemampuan mengambil risiko dan menyukai tantangan, *keempat*, memiliki aspek kepemimpinan yang kuat, ditunjukkan dengan kemampuan bergaul yang baik dan menanggapi saran dan kritik dengan baik. *Kelima*, memiliki orientasi ke masa depan, *keenam*, orisinalitas pemikiran yang ditandai dengan inovasi dan kreativitas. Seorang *political entrepreneur* dapat dibentuk, bukan lahir begitu saja. *Political entrepreneur* pada dasarnya merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Seseorang yang memiliki jiwa tersebut tentu dapat melakukan kegiatan kewirausahaan atau menjadi pelaku kewirausahaan atau bisa lebih dikenal dengan sebutan wirausaha (*entrepreneur*). Maka sebaliknya, yang tidak memiliki jiwa demikian tentu tidak bisa disebut sebagai wirausaha meskipun melakukan kegiatan bisnis.

Namun, jiwa kewirausahaan tersebut tentu tidak menghadapi tantangan. Jika diamati, terdapat kendala lain yang berasal dari aktor-aktor politik di luar *political entrepreneur*, yaitu aktor politik di luar wilayah desa Alang-alang. Dalam hal ini adalah aktor politik yang di kabupaten Bangkalan. Resistensi bisa muncul karena secara kalkulasi, *klebun* desa Alang-alang memiliki potensi besar sebagai elite politik baru di Bangkalan, yang tentu akan berkompetisi secara ketat dengan aktor-aktor lainnya. Modal sosial, modal politik yang dimiliki *klebun* dan publikasi luas yang saat ini dimiliki, tentu sangat berpengaruh dalam kompetisi yang akan diikuti di masa yang akan datang.

Kondisi ini tentu menjadi sangat logis karena kriteria dan standar yang dimiliki tentu berbeda antara satu institusi dengan institusi lain. Seleksi inovasi kelembagaan cenderung berpindah dari institusi formal dan kondisi struktural ke institusi informal dan kondisi yang lebih personal/istimewa. Faktor lain yang mendorong aktivitas *political entrepreneur* mungkin adalah *pressure* dari persaingan antar aktor. *political entrepreneur* bukan hanya "permintaan" tetapi juga fenomena "penawaran". Sebab bakat kewirausahaan dan kemauan untuk mengambil risiko adalah sumber daya yang langka dalam diri aktor. Tingkat kelangkaan yang relatif ini kemudian akan tergantung pada fitur struktural tambahan. Bisa diperoleh dari sistem ekonomi-politik juga terkait dengan pembacaan aktor politik dalam memaknai sebuah realitas di masyarakat.

Peran kewirausahaan politik dalam konteks seperti ini menjadi alternatif dalam mengembangkan konsep "arbiter publik". Secara oportunistik mengkhususkan diri dalam eksploitasi konstelasi yang memungkinkan perubahan sedikit demi sedikit, mengingat kuatnya pembatasan pada tingkat institusi politik informal. Schnellenbach berkesimpulan bahwa wirausahawan publik terbatas pada individu yang mempromosikan *non-incremental* perubahan. Mengingat kelangkaan relatif dari perubahan revolusioner, maka peran kewirausahaan politik dalam pengertian Schumpeter sebagian besar diberhentikan baik dari sudut pandang empiris maupun normatif.

Dalam perspektif evolusioner, wirausahawan politik terus-menerus menghasilkan variasi sehingga memenuhi fungsi penting dalam menjaga sistem keberhasilan. Variasi dalam proses seleksi kelembagaan ini adalah masalah keadaan sistemik dan historis tertentu tetapi tidak secara langsung terkait dengan pentingnya kewirausahaan. Popularitas *klebun* menguatkan tulisan berjudul "*Social Capital in the Creation of Human Capital*".

Modal sosial yang sudah dimiliki *klebun* menjadi sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial yang dipilih. *Klebun* menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Coleman melihat bagaimana modal sosial terbentuk dan menyoroti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda. Ia menggambarkan bagaimana modal sosial (*social capital*) berperan dalam menciptakan model manusia (*human capital*) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Coleman mendefinisikan

social capital sebagai semua aspek yang mengarah dan diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosial.

Struktur sosial melahirkan dorongan sosial menjadi lebih berkuasa atas perilaku individu. Dorongan sosial tersebut yang disesuaikan dengan norma-norma sosial meliputi; kultur yang dominan, pengaruh kekuatan sosial lain atas perilaku lebih umum. Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. *Pertama*, aspek dari struktur sosial yang menciptakan dukungan dalam sebuah jaringan sosial di Bangkalan yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. *Kedua*, adanya organisasi (baca: desa Alang-alang) yang dapat digunakan membangun pilar modal sosial *klebun*.

Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan. Modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian. Aktor di desa Alang-alang bisa dikatakan memiliki modal sosial berupa hubungan baik dengan aktor-aktor politik di Bangkalan dan ia akan memperoleh keuntungan berupa materi atau perlindungan dari pejabat atau penguasa itu.

Tetapi apabila kemudian situasi berubah, modal sosial semacam itu justru bisa berbalik merugikannya. Orang-orang yang berseberangan paham politik dengan pejabat itu pasti tidak akan memberikan kesempatan padanya untuk mendapat keuntungan

dalam bentuk apapun, bahkan dalam situasi tertentu bisa mence-lakakannya. Paling tidak ia akan dimarginalkan dan tidak akan mendapat kepercayaan dalam jejaring tersebut.

Pelibatan Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Salah satu fenomena penting dalam pengelolaan pemerinta-han adalah partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka program perencanaan, pelaksanaan, pelaksana-naan, serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena masyarakat diasumsikan memahami permasalahan dan kebutuhan dalam membangun wilayahnya. Proses perencanaan partisipatif sangat penting karena berupaya mempertemukan me-kanisme perencanaan dari pusat (*top down*) dan perencanaan pe-mbangunan (Musrenbang). Dalam perspektif pengelolaan pema-ngunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yaitu sebagai pe-laku utama (*actors* atau *participant*) dalam pengelolaan pema-ngunan dan pemanfaatan (*beneficeries*) hasil kegiatan pembangu-nan.

Keikutsertaan masyarakat merupakan hal sangat penting da-lam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat da-lam proses pembangunan seharusnya bisa dilakukan dalam kese-luruhan proses dari awal hingga akhir. Apakah masyarakat ter-libat dalam rangkaian proses tersebut atau hanya menjadi objek dalam kegiatan pemerintahan tersebut. Pelibatan masyarakat ini sangat penting agar kebijakan publik yang lahir tidak bersifat eli-tis, tetapi menjadi bukti kebijakan partisipasi.

Pemikiran perencanaan partisipasi diawali dari kesadaran bahwa kinerja prakarsa pembangunan ditentukan oleh semua pih-ak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Partisipasi secara utuh dan melibatkan aktor-aktor utama pembangunan daerah sejak ta-hap perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi merupakan daya dorong untuk mewujudkan sistem manajemen pembangunan yang kondusif. Situasi inilah yang terbentuk di desa Alang-alang. Meskipun berada dalam derajat yang rendah, namun upaya untuk membentuk pelibatan masyarakat tersebut sudah mulai tampak. *Klebun* juga mensosialisasikan kegiatan desa secara masif melalui simpul-simpul yang ada dalam masyarakat maupun melalui media sosial.

Dalam beberapa kali kegiatan, tidak mudah mensosialisasi-kan sebuah kegiatan di masyarakat. Pelatihan pembuatan *eco print*, misalnya. Pelatihan dilakukan di dusun Nangke, awalnya juga mengalami kesulitan untuk mengumpulkan 15 orang sebagai

peserta kegiatan. Namun, setelah melihat bagaimana kegiatan tersebut, maka masyarakat jadi ingin mengikuti. Pada pelaksanaan pembangunan desa, pelibatan masyarakat ini juga menjadi salah satu usaha kreatif yang dilakukan oleh *klebun* untuk membangun rasa kepemilikan atas kegiatan desa pada masyarakat desa Alang-alang. Pelibatan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat belum terbiasa aktif dalam kegiatan-kegiatan desa. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat desa sudah sekian lama berada dalam sebuah komunitas yang minim pengelolaan karena pemerintahan desa biasa dilakukan secara elitis dan berjarak dengan masyarakat. Pengelolaan desa bersifat konvensional dan hanya sebatas pengelolaan administratif semata dan minim kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Perubahan Pola Komunikasi Antara Klebun dengan Masyarakat

Dalam demokrasi, salah satu elemen pentingnya adalah komunikasi yang dipraktikkan aktor-aktor terkait. Politik substantif dalam negara demokratis harus bisa memadukan dua hal secara bersamaan yaitu sistem demokratik seperti perangkat hukum, aturan dan kebijakan serta etos demokrasi seperti nilai, keluhuran budi, kearifan lokal. Dalam politik, kompetisi adalah hal yang biasa. Namun, dalam perspektif komunikasi politik, pesan dan tindakan para aktor politik harus mampu menjembatani kesadaran politik masyarakat agar bisa tumbuh menguat dan berdaya. Hal ini disebabkan karena proses konsolidasi demokrasi tidak hanya bisa dilakukan oleh elite, masyarakat adalah elemen penting di dalamnya dan elite harus menopang serta menguatkan agar demokrasi berjalan lebih baik. Konsolidasi tidak hanya mempersyaratkan demokrasi elektoral, namun juga harus menyentuh demokrasi substantif. Kritisisme, kepedulian masyarakat dalam perencanaan, proses maupun evaluasi pembangunan.

Strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh *klebun* ini menarik untuk dikaji. Keanekaragaman masyarakat yang ada di sekelilingnya, tentu terkait erat dengan pendidikan, status sosial, profesi. Kerumitan tersebut tentu saja membutuhkan kejelian untuk memilih dan memilah bagaimana seorang pemimpin menghadapi masyarakat. Apa pesan politik yang harus disampaikan, bagaimana merumuskan, dengan cara apa, di mana dan kapan, bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Fenomena inilah yang disebut oleh Steph Newell sebagai *cultural politics* (Newell, 2014: 178). Komunikasi politik sangat bergantung pada

cara budaya, termasuk sikap, pendapat, kepercayaan dan perspektif, juga media dan seni yang mempengaruhi masyarakat dan pandangan politik

Komunikasi tentu bisa mengembangkan niat baik, pemahaman bersama yang harus dikelola secara berkelanjutan. Komunikasi bisa memberi dan membuka ruang untuk bersepakat (*zone of possible agreement*) (Heryanto, 2019: 318) dan memungkinkan tiap kepentingan dan perbedaan bisa menemukan titik temu dan kemudian berdialog, berdialektika dan pada akhirnya mencapai konsensus bersama. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tata kelola komunikasi harus diperkuat dan menjadi agenda prioritas.

Pemetaan *klebun* pada aspek subjek komunikasi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi politik yang dibangunnya. Gaya komunikasi yang dialogis dan tidak instruktif, justru menjadi kunci keberhasilan komunikasi antara *klebun* dengan aparat pemerintahan yang masih berusia muda. Ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa aparat pemerintah dalam struktur pemerintah desa berusia muda.

Media Sosial dan Dinamika Politik di Desa Alang-Alang

Menurut Manuel Castell, media sosial merupakan ruang-ruang otonomi yang berjaring di luar jangkauan pemerintah maupun korporasi-korporasi yang memonopoli saluran komunikasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Castell, 2014: 722). Di Indonesia, kelompok muda berperan aktif memanfaatkan kemajuan teknologi internet dan media sosial untuk tujuan sosial yang positif, misalnya dalam menyebarkan gagasan dan partisipasinya di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Kemunculan teknologi membawa kita pada *new public sphere* (Heryanto, 2018: 38) yang terlepas dari hegemoni penguasa. Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan *political society* sangat mungkin terjadi melalui pemanfaatan media sosial.

Pembelajaran penting yang terjadi di desa Alang-alang sebenarnya menunjukkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan membentuk: *pertama*, dikursus antar masyarakat dan hadirnya partisipasi masyarakat, serta munculnya keterlibatan warga sebagai modal awal tumbuhnya demokrasi yang kondusif. Kedua, *opinion building*. Komunikasi massa telah mengarahkan pemerintah, politisi, dan media massa untuk mengandalkan pengumpulan pendapat publik. *Ketiga*, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap aktor-aktor politik yang berada di pemerintahan, sehingga menimbulkan *trust* kepada

kepemimpinan yang ada. Tentu saja, ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menumbuhkan keaktifan masyarakat dalam persoalan politik.

Aktor politik di desa Alang-alang menyadari betul fenomena ini. *Klebun* menggunakan media sosial membangun popularitasnya, baik dunia *offline* maupun dunia *online*. Ia memanfaatkan jejaringnya di media *online* seperti Lingkar Jatim dan Radar Madura untuk melakukan *ekspose* program kerja pemerintah desa dan kegiatan yang diadakan melalui media tersebut. *Klebun* juga aktif memanfaatkan *Insta Story* Instagram, Facebook, dan Whatsapp untuk mengupdate informasi di ruang publik. Insentif yang dimiliki aktor politik yang memanfaatkan media sosial ini tentu adalah popularitas.

Nugroho dalam Gun Gun Haryanto menyebutkan tiga proses penggunaan media sosial dalam demokratisasi. *Pertama*, internet sebagai sumber informasi. Masyarakat menjadi melek politik karena internet. *Kedua*, media sosial berbasis internet menjadi medium paling interaktif bagi anggotanya dibanding media massa. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat muncul untuk mewujudkan kepentingan umum. Jenis partisipasi yang bisa terlihat antara lain: *pertama*, partisipasi untuk mendukung atau menentang kebijakan, *kedua*, partisipasi politik dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. *Ketiga*, partisipasi sosial, untuk meningkatkan modal sosial seperti solidaritas sosial. *Keempat*, desentralisasi. Artinya, membawa pemerintah lebih dekat pada masyarakat, dalam konteks memudahkan masyarakat terlibat dalam praktik demokrasi (Nugroho, 2019: 738).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi seseorang pada pemimpinnya sangat ditentukan bagaimana transparansi yang terjadi. Sekali lagi, media sosial menjadi media efektif dalam *opinion building* efektif dan efisien. Hal ini memperkuat asumsi bahwa relasi kuasa di masa politik kontemporer memang sulit hanya membicarakan aktor atau elite negara (*state actors*), namun sangat penting untuk memberi ruang pada diskusi dari perspektif aktor masyarakat (*society actors*). Tokoh masyarakat, media massa, media sosial merupakan aktor penting dalam proses konsolidasi demokrasi di dunia.

Tagline Desa “Prajurit Rakyat”: Desakralisasi kepemimpinan

Pergeseran dari otorianisme kekuasaan di level eksekutif sudah mulai tampak, setidaknya melihat realitas tata kelola pemerin-

tahan yang ada di desa Alang-alang, maka warna perubahan tersebut mulai menemukan titik cerah. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa Alang-alang memiliki *tagline* “Prajurit Rakyat”. Pemimpin adalah pelaksana dan eksekutor dari mimpi-mimpi yang dimiliki masyarakat. Maka aparat pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan entitas yang harus dihormati, diistimewakan dan dilayani oleh masyarakat. Jika pemimpin siap melayani masyarakat, maka dia adalah prajurit untuk masyarakat.

Pilihan ini sesungguhnya bisa dilihat sebagai fenomena *Beyond the Comfort Zone* bagi seorang aktor politik. Kesediaan berkorban bagi masyarakat tentu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya *klebun* desa Alang-alang memiliki usaha bersama dengan istrinya di Surabaya untuk menjual barang-barang sembako. Ini bagian dari upaya untuk menguatkan ekonomi keluarga. Asumsinya, ketika ekonomi keluarga bagus, maka keluarga *klebun* bisa melampaui zona kenyamanan tersebut dan bisa lebih fokus melakukan pelayanan pada masyarakat.

Mind set kepemimpinan ini menjadi modal penting dalam pengelolaan desa di Bangkalan, yang sudah sekian lama memposisikan *klebun* sebagai pemegang kendali penuh masyarakat. Gaya kepemimpinan yang dipraktikkan secara umum ini tidak memberi ruang kepada publik untuk berpartisipasi secara aktif. Kepemimpinan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya menggunakan otoritas (*power*), tetapi juga menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan orang lain. Dalam perjalanannya, pemimpin pasti akan menghadapi berbagai karakter, perilaku, dan tingkat kematangan pribadi bawahannya.

Servant Leadership dibutuhkan oleh masyarakat, dimulai dari keinginan untuk melayani terlebih dahulu. Dengan pilihan sadar, kepemimpinan dilakukan dengan cara menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, mengenal kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu, juga membantu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Model kepemimpinan ini bisa juga digunakan dalam kondisi krisis kepemimpinan. Sehingga skala prioritas kepemimpinan adalah masyarakat. Sinergi antara pemimpin dengan masyarakat menjadi kata kunci keberhasilan kepemimpinan ini. Pemerintahan desa Alang-alang ini mencoba melakukan desakralisasi kepemimpinan. Ada keinginan agar aparat pemerintah desa Alang-alang tidak berjarak dengan masyarakat melalui *tagline* tersebut. Salah satu perwujudan upaya tersebut adalah adanya “Mobil rakyat” yang dimiliki desa Alang-alang. Mobil ini digunakan untuk melayani masyarakat

desa, misalnya ketika pembagian sembako, bantuan-bantuan sosial, dan sebagainya

Penutup

Dalam praktik pemerintahan desa, *Klebun* desa Alang-alang memahami betul bagaimana strategi politik yang harus diterapkan untuk mengelola aktor-aktor di sekitarnya. Setiap relasi yang dibangun oleh *klebun* terhadap aktor di sekelilingnya disadari betul sebagai bagian untuk memproduksi kekuasaan sekaligus mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Berdasarkan strategi yang dijalankan oleh *klebun*, maka ada elemen *entrepreneurship* yang bisa didapatkan oleh *klebun* secara positif dalam perspektif sistem politik. Keuntungan tersebut bisa diperoleh dalam proses pelayanan publik dan mencari keuntungan kolektif yang potensial. Di dalamnya juga terdapat strategi kebijakan publik dan budaya non material. Kemampuan *klebun* menemukan peluang yang dimiliki untuk mengelola institusi di level desa, ditunjukkan, dengan cara membentuk, mengubah dan mengkonsolidasikan institusi-institusi politik dan institusi Pendidikan sebagai mitra desa. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut, dalam jangka panjang akan menjadi modal sosial bagi *klebun* dalam demokrasi electoral di kabupaten Bangkalan.

Dalam konteks demokratisasi di tingkat lokal, aktor-aktor politik di desa Alang-alang mencoba keluar dari sentralisme kekuasaan yang sangat kuat dialami pada pemerintahan kabupaten sebelumnya. Aktor-aktor tersebut mencoba keluar dari situasi sentralisme kekuasaan yang melahirkan kekuasaan otoriter, menjadi kekuasaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Upayanya untuk keluar dari situasi kekuasaan *status quo* menjadi kepemimpinan yang melayani adalah sebuah inovasi dalam kepemimpinan politik di Bangkalan. Hal ini terlihat dari pelibatan masyarakat dalam kegiatan desa, perubahan pola komunikasi antara *klebun* dengan masyarakat, transparansi dana desa melalui media sosial, serta publikasi secara luas melalui media sosial. Namun, kemampuan *klebun* untuk mengelola politik desa, juga harus diantisipasi agar tidak muncul raja baru di level desa.

Daftar Rujukan

Castell, Manuel . 2014. *The Network of Outrage and Hope: Social Movement in The Internet Age*, dikutip oleh Veronica Ahmad, *Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial* : Jakara: KPG.

- Emmerson, Donald. 2017. *Will Indoesian Survive?*, Foreign Affairs 79(3): 95-106. Web
- Heryanto, Gun Gun. 2019. *Panggung Komunikasi Politik: Dilema antara Idealitas dan Realitas Politik*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, Yogyakarta: IRCiSOD.
- Holcombe, Randall G. 2002. *Political entrepreneurship and The Democratic Allocation of economic Resource* ,The Luwer Academic Publishers. Manufactured in the Netherlands review of Austrian Economics, 15:2/3.
- Karim, Abdul Gaffar dkk, 2010. *Otonomi Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Abdul Gaffar. 2021. *Menegosiasi Ulang Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Kirk, Jerome dan Merc L. Miller, 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research* (Baverly Hills:Sage Publication.
- Lay, Cornelis. 2017. *Political Linkages between CSOs and Parliament in Indonesia: a case Study of Political Linkages in Drafting The Aceh Governance Law*, *Asian Jurnal of Political Science* 25 (1), Routledge: 130-50.doi:10.1080/02185377-2017.1297243.
- Meredith, Geoffrey G. 2007. *Political Entrepreneurship and Institutional Change: AN Evolutionary perspective*, Paper Prepared for EAEPE Conference, porto: Nopember.
- Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Rosdakarya.
- Muthma'innah, dkk 2018. *Perubahan Lanskap Budaya Masyarakat Bangkalan Pasca beroperasinya Jembatan Suramadu*". Laporan Riset Mandiri. Universitas Trunojoyo Madura.
- Muhlis, 2021. *Local Bossism dalam Demokrasi Lokal di Bangkalan : Dinamika Aliansi Bisnis Politik Dominan di bangkalan Pasca Berkahirnya Kekuasaan Politik Fuad Amin Imron*, Thesis, 2021, Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, <http://repository.unair.ac.id/105271/2/1.%20HALA-MAN%20JUDUL.pdf>, diunduh Tgl 18 September 2021.
- Newell, Steph. <https://blogs.sussex.ac.uk/dirtpol/2014/04/01/-what-is-meant-by-cultural-by-prof-steph-newell>

- Nugoroho, Yanuar dan Sofie Shinta Sharief, 2016. *Beyond Click Activism? New Media and Political process in The Cotemporary Indonesia*, Paper riset University of Manchester dan HIVOS Regional Southeast Asia, atau Sponsor FES, dikutip Veronica Hamid.
- Permana, Danny. 2021. *Model Kepemimpinan Masa Depan di Indonesia dalam perspektif Sipil dan Militer*, Jurnal Academia Praja, Vol 4 no 1, Februari.
- Roberts, NC. &PJ King, 2006. *Policy Entrepreneurs: Their Activity Structure and Function in the Policy Process*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. I, no 2
- Rozaki, Abdur . *Islam, Oligarkhi, dan Perlawanan*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2016), hal. xxi
- Rosi, Fathor. 2019. Skripsi: *"Kompetisi Politik Antar Aktro Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Thaun 2018 (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Trageh Kabupaten Bangkalan"* Surabaya: UINSA
- Satriani, Eka, Alfian Biroli. 2021. *Kembali ke Remaph: Upaya Rumaha Tangga Petani di Bangkalan Guna Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan selama Pandemi Covid-19*, Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan, vol 1 no. 1.
- Smith, Brian. 2003. *Understtanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development*. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Saliman, tt, Kepemimpinan; *Konsep, Pendekatan dan Strategi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salerno, M. McCaffrey&J.T. . 2011. *A Theory of Political Entrepreneurship Modern Economy*
- Zuhro, Siti dkk, 2009. *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak

Media Online:

Kabar Madura, Kepala Desa Alang-Alang Jalin Kerja Sama dengan Utm di bidang Teknologi Digital Untuk Kembangkan Desa, dari <https://kabarmadura.id/kepala-desa-alang-alang-jalin-kerja-sama-dengan-utm-di-bidang-teknologi-digital-untuk-kembangkan-desa/>, diakses pada 13 Oktober pukul 11.23

Redaksi Advokasi.co, Didatangi Kepala Desa, BPN Bangkalan Klarifikasi Proses 5 SHM Warga Alang-Alang, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 08.30

Masterdesa.com, *Pengembangan Sistem Informasi E-Desa Untuk Mewujudkan Smart Village*, diakses pada tanggal 17 Oktober pukul 10.15

Ini Outlook Desa Alang-alang tahun 2020, Lingkar Jatim, <https://lingkarjatim.com/madura/bangkalan/ini-outlook-desa-alang-alang-tahun-2020/>, diunduh tgl 18 Juli 2021